



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SISWOYO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 807372

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **335.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/84 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 249.000.000
2. Tanah Seluas 656 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 32.800.000
3. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **120.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA E Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI KLX 150 S Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
3. MOTOR, HONDA GL MAX Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **43.550.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **905.772.208**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.405.122.208**



III. HUTANG

Rp. 10.317.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.394.804.608

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.